

Rekayasa Lalu Lintas di Area Konstruksi MRT Glodok-Kota

JAKARTA (IM) - Dinas Perhubungan DKI Jakarta menentukan rekayasa lalu lintas di area konstruksi Moda Raya Terpadu (MRT) Fase Dua Stasiun Glodok-Stasiun Kota di Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Pintu Besar Selatan yang dijadwalkan 1 September hingga 31 Desember 2021. Area konstruksi dimulai dari depan LTC Glodok sampai dengan Simpang Kota Tua.

"Pengganda jalan diimbau agar menghindari ruas jalan itu dan menyesuaikan pengaturan lalu lintas," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo di Jakarta, Jumat (27/8).

Adapun rekayasa lalu lintas untuk segmen Stasiun MRT Kota pada 1 September hingga 31 Oktober 2021, yakni "stage" nol di lokasi pekerjaan di Jalan Pintu Besar Selatan berada di trotoar. Pekerjaan yang dilakukan adalah persiapan pemagaran, relokasi utilitas dan saluran air, relokasi pos polisi, survei pra konstruksi, dan pelebaran jalan.

Konsekuensinya, terjadi

pengurangan lajur jalan menjadi satu dari semula dua lajur reguler dan satu jalur TransJakarta akan menjadi satu lajur reguler dan satu jalur TransJakarta sepanjang area pekerjaan. Untuk segmen Stasiun MRT Glodok dimulai pada 20 September hingga 31 Desember 2021, yakni Stage 1 di lokasi pekerjaan di Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk berada di median tengah jalan/taman.

Pekerjaan yang dilakukan adalah persiapan pemagaran, "test pit", relokasi utilitas, pemotongan dan relokasi pohon, pembongkaran median dan trotoar, pekerjaan Jembatan Penyeberangan Orang dan Halte Bus TransJakarta.

Akibat rekayasa lalu lintas ini, satu lajur berkurang dari yang semula empat lajur reguler dan satu jalur TransJakarta akan menjadi empat lajur "mixed traffic" sepanjang area pekerjaan. Keselamatan dan keamanan pengguna jalan baik pengendara kendaraan bermotor maupun pejalan kaki di lokasi pengerjaan menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan, yakni SMCC-HK. yan

Anies Baswedan: 610 Sekolah di Jakarta Gelar PTM Senin

JAKARTA (IM) - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebut bahwa pembelajaran tatap muka (PTM) akan dimulai Senin (30/8).

"Insya Allah hari Senin besok akan dimulai 610 sekolah di seluruh Jakarta," ujar Anies kepada wartawan disela kunjungannya ke Masjid At-Tabayyun, Taman Villa Meruya, Jakarta Barat, Jumat (27/8).

Anies mengklaim bahwa guru di Ibu Kota telah mencapai 85 persen sudah disuntik vaksinasi. Sementara sisanya mereka yang memiliki komorbid ataupun penyintas Covid-19.

"Alhamdulillah pada hari ini 85 persen guru sudah tervaksinasi. Yang 15 persen itu adalah mereka yang memiliki komorbid atau penyintas sehingga be-

lum bisa divaksinasi. Tapi, pada waktunya mereka akan mendapatkan vaksin," tuturnya.

Kemudian, Anies menambahkan bahwa 610 sekolah terdiri dari semua jenjang sekolah yang telah melewati proses verifikasi. Adapun sekolah harus melalui proses assessment.

"610 sekolah yang akan mulai itu mulai dari semua jenjang dan mereka adalah sekolah yang sudah melewati verifikasi.

Ada assessment satu, assessment dua. Assessment satu adalah kesiapan secara sarana prasarana. Assessment dua adalah kesiapan kepala sekolah para guru dan orang tua. Semuanya dilakukan assesment. Yang dinyatakan lolos baru mereka bisa mengikuti PTM ini," tandasnya. yan

Pj. Bupati Bekasi Minta Jajarannya Lakukan Strategi Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

CIKARANG PUSAT (IM) - Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, pimpin rapat bersama Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bekasi. Dirinya meminta strategi atau terobosan baru dapat dilakukan oleh Disnaker guna menyerap lebih banyak calon tenaga kerja lokal di Ruang Rapat Bupati, Kamis (26/8).

Dani melihat, masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi cukup kontradiktif. Pasalnya, pusat kesempatan kerja terbuka, namun angka pengangguran tetap tinggi, akibat para pekerja lokal kurang terserap.

"Penanganan untuk tenaga kerja baru belum juga optimal. Agar masyarakat ini bisa terserap, ini agar digali lebih dalam. Strateginya tidak harus di pabrik. Mungkin ini juga harus buat terobosan, lebih bervariasi. Mungkin bisa ada pelatihan bisnis rumah kontrakan, laundry, catering," ungkapnya dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Kamis (26/8) malam.

Dani mengatakan, kerja sama dibutuhkan dalam membuat strategi untuk menangani permasalahan pengangguran. "Kerja sama dengan UMKM, Bumdes, agar cerita sulitnya bekerja di wilayah sendiri

tidak berulang. Kita cari terobosan baru," cetusnya.

Kemudian, ia juga memberikan arahan agar dapat mendata kebutuhan pabrik yang dapat dipenuhi oleh masyarakat sekitar, sehingga masyarakat tetap punya manfaat dari aktivitas pabrik.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Supuh, menuturkan sesuai arahan yang diberikan oleh Pj. Bupati Bekasi, nantinya Disnaker Kabupaten Bekasi akan melakukan strategi dalam menghadapi angka pengangguran lokal.

"Kemudian kita menginformasikan kebijakan berkaitan mengenai ketenagakerjaan. Jadi, di tahun 2022 kita mengambil terobosan-terobosan untuk mengurangi pengangguran, terutama tenaga kerja lokal," jelasnya.

Dalam agenda itu turut dibahas mengenai pemaparan data yang diperoleh Disnaker Kabupaten Bekasi pada tahun 2020 terkait data perusahaan dan pekerja di Kabupaten Bekasi. Pada paparan tersebut menyebutkan terdapat 7.339 perusahaan dan 558.193 pekerja yang terdaftar, dengan jumlah tenaga kerja asing sebanyak 2.104 dan 594 peserta magang. ● mdl

10 Kecamatan di Jakarta Berpotensi Alami Pergerakan Tanah

JAKARTA (IM) - Sejumlah masyarakat daerah bantaran sungai di Jakarta diminta untuk waspada dan mengantisipasi terjadinya pergerakan tanah pada September 2021. Sedikitnya ada 10 kecamatan yang berpotensi mengalami pergerakan tanah jika curah hujan di atas normal.

Berdasarkan informasi dari PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi), beberapa daerah di Provinsi DKI Jakarta berada di Zona Menengah. Di antaranya Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Untuk Jakarta Selatan, wilayah yang berpotensi pergerakan tanah di Kecamatan Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, dan Pesanggrahan. Sementara untuk Jakarta Timur berada di Kecamatan Kramat Jati dan

Pasar Rebo. Sepuluh kecamatan itu berpotensi terjadi gerakan tanah, disusun berdasarkan hasil tumpang susun (overlay) antara peta zona kerentanan gerakan tanah dengan peta prakiraan curah hujan bulanan yang diperoleh dari BMKG.

"Semua berpotensi Menengah," seperti dikutip dalam infografik yang dibagikan akun Instagram @bpbddkijakarta, Jumat (27/8). Pada Zona Menengah dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan. "Untuk itu, kepada lurah dan camat diimbau untuk tetap antisipasi adanya potensi gerakan tanah pada saat curah hujan di atas normal," tulis BPBD DKI Jakarta. ● yan

4 | Metropolis

IDN/ANTARA



WAGUB: INTERPELASI BAGIAN DARI DEMOKRASI

7 Fraksi di DPRD DKI Tolak Interpelasi Formula E

Tujuh fraksi yang menolak yakni Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, NasDem, Golkar, dan FKB-PPP. Dari total itu, sebanyak 73 anggota DPRD enggan menyetujui hal interpelasi, karena hak interpelasi itu dianggap tidak bermanfaat untuk warga Jakarta.

JAKARTA (IM) - Tujuh fraksi partai di DPRD DKI Jakarta menolak penggunaan hak interpelasi untuk pelaksanaan Formula E. Penggunaan hak interpelasi untuk hal itu dinilai perbuatan yang gegabah. "Terlalu gegabah karena persoalan Formula E yang ingin ditanyakan PSI dan PDIP bisa dilakukan dalam forum komisi dan badan di rapat-rapat dewan," kata anggota Fraksi NasDem DPRD DKI, Ahmad Lukman Jupiter melalui keterangan tertulis, Jumat (27/8).

Jupiter mengatakan tujuh fraksi yang menolak yakni Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, NasDem, Golkar, dan FKB-PPP. Dari total itu, sebanyak

73 anggota DPRD enggan menyetujui hal interpelasi. Jupiter menyebut hak interpelasi itu tidak bermanfaat untuk warga Jakarta. Menurutnya, pengajuan hak itu malah terkesan terburu-buru. "Jadi, dalam pembahasan masing-masing komisi terkait, prosesnya panjang dan sudah disetujui. Kok sekarang dibuat interpelasi," ujar Jupiter.

Jupiter menyebut pergeleran Formula E masih panjang. Dia mengaku bingung ada beberapa temannya di DPRD yang sudah mengajukan hal tersebut. Jupiter juga menyebut Formula E bakal bermanfaat bagi warga Ibu Kota jika didesain dengan baik dari sekarang. Pasalnya, ajang

balap mobil listrik itu merupakan sorotan dunia.

"Sekaligus, kita bisa menunjukkan bahwa Indonesia mampu keluar dari pandemi covid-19," tutur Jupiter.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI, Desi juga meminta teman-teman lainnya tidak mengajukan hak interpelasi. Dia meminta semua wakil rakyat di DPRD DKI untuk fokus menangani pandemi covid-19. Anggota DPRD yang tidak mengurus itu diminta tidak ikut campur. Seluruh anggota diminta fokus untuk bekerja. "Pembahasan Formula E) bisa pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI," ujar Desi.

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI, Abdul Aziz menyebut waktu pengadaan balapan Formula E masih panjang. DPRD DKI masih bisa meminta penjelasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjamin pergeleran itu tidak membuat pandemi makin galak. "Kami tidak menggunakan cara-cara yang force. Ini (interpelasi) kan cara force, ya memaksa bahwa ini harus

memberikan," ucapnya.

Hormati Hak Interpelasi

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menghormati keputusan dari dua fraksi di DPRD DKI Jakarta yang mengajukan hak interpelasi atau meminta keterangan terhadap Gubernur Anies Baswedan. Hak interpelasi itu terkait rencana penyelenggaraan Formula E.

"Kami menghormati teman-teman DPRD. Dua fraksi yang mengusulkan interpelasi, kami hormati itu," kata Riza usai meninjau vaksinasi di SMK 6 Jakarta Selatan, Jumat (27/8).

Menurut dia, langkah tersebut merupakan bagian dari demokrasi yang diatur oleh undang-undang. Namun demikian, Riza tetap berharap agar interpelasi itu dibatalkan dan menggunakan jalur dialog sebagai media utama untuk menjawab pertanyaan dari anggota DPRD terkait Formula E tersebut.

Riza mengatakan, program yang telah dicanangkan sejak 2019 itu akan berdampak posi-

PENGERUKAN WADUK PLUIT

Petugas mengoperasikan alat berat untuk mengeruk endapan Waduk Pluit di Jakarta, Jumat (27/8). Pengerukan tersebut bertujuan mencegah pendangkalan waduk sebagai upaya pencegahan banjir di Ibu Kota.

Pemkab Bekasi Ikuti Penilaian Kinerja Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting

CIKARANG PUSAT (IM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengikuti penilaian kinerja dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting tahun 2020-2021, yang berlangsung secara virtual di Ruang Command Center, Gedung Diskominfosantik, Cikarang Pusat, Kamis (26/8).

Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, dalam pemaparannya mengatakan bahwa, prevalensi stunting di Kabupaten Bekasi pada tahun 2018 adalah sebesar 26,37%, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 20,93%. Hal ini membuat Kabupaten Bekasi menduduki peringkat ke-5 kasus stunting terendah di Jawa Barat.

"Dengan prevalensi stunting pada tahun 2019, Kabupaten Bekasi termasuk dalam kategori sedang, hal inilah

yang menjadi pemicu gerakan pencegahan dan penurunan angka stunting di Kabupaten Bekasi," ujar Pj. Bupati dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Kamis (26/8) malam.

Dirinya menambahkan, Kabupaten Bekasi telah ditetapkan sebagai lokus pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi tahun 2020, bersama dengan 260 kabupaten dan kota lainnya. Dari 23 desa lokasi prioritas terdapat 2.259 yang perlu mendapat penanganan stunting.

Untuk itu, pihaknya terus berkomitmen dalam pencegahan stunting, dan siap mendukung maupun menyelesaikan setiap program serta kegiatan dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi di Kabupaten Bekasi.

Selain itu, Pj. Bupati juga

menargetkan penurunan stunting sebesar 6% di RPJMD 2017-2022 Kabupaten Bekasi, sesuai dengan kelompok sasaran 1000 HPK, seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak 0-23 bulan, kelompok sasaran usia lain (remaja putri, wanita usia subur, anak usia 24-59 bulan) serta masyarakat umum.

Dirinya juga meminta kepada tim penurunan stunting Kabupaten Bekasi, agar segera melakukan evaluasi dan inovasi serta perbaikan dalam kinerja pencegahan dan penurunan stunting yang masih terdapat kekurangan.

"Tadi dari hasil penilaian itu, memang ada beberapa hal yang menunjukkan kinerja kita masih kurang, saya minta tolong diperbaiki termasuk dengan kelengkapan data, juga program sektornya juga lebih detail lagi," pintanya. ● mdl

BERPOTENSI SEBARKAN COVID-19

Polisi Larang Warga Jakarta Bersepeda

JAKARTA (IM) - Polisi masih melarang warga Jakarta bersepeda selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3. Kegiatan bersepeda dianggap berpotensi menyebarkan covid-19.

"Untuk pesepeda masih tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena pesepeda itu dikhawatirkan menimbulkan kerumunan," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo saat dikonfirmasi, Jumat (27/8).

Sambodo mengatakan DKI Jakarta telah melewati gelombang kedua covid-19 dengan baik. Namun, warga Ibu Kota diimbau tidak boleh lengah dengan penurunan angka harian positif covid-19 di Jakarta. "Kita tetap harus waspada," ujar dia.

Sambodo menyebut Eropa saat ini sudah mengalami gelombang ketiga. Dia tidak ingin

Indonesia juga mengalami hal itu. "Oleh sebab itu, segala macam kegiatan dan aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan harus kita hindari. Protokol kesehatan 5M harus jadi patokan kalau kita mau mempertahankan covid-19 seperti ini," ungkap Sambodo.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurunkan status Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dari PPKM Level 4 menjadi Level 3. Status ini berlaku 24-30 Agustus 2021. Menyusul itu, kebijakan ganjil genap diperbarui. Sebelumnya ada delapan kawasan menjadi tiga ruas jalan yang diterapkan ganjil genap. Yakni Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, dan Jalan Rasuna Said. Kebijakan itu dibuat untuk membatasi mobilitas masyarakat. Dengan begitu dapat menekan penyebaran covid-19 di Ibu Kota. ● yan

Dani Ramdan Minta Kerja Sama Pengelolaan Sampah TPA Burangkeng Dipercepat

CIKARANG PUSAT (IM) - Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, meminta kepada Perangkat Daerah terkait untuk dapat mempercepat proses kerja sama pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Setu.

Hal tersebut disampaikan saat mengadakan rapat pemaparan terkait pengolahan sampah dengan pihak swasta, yakni PT. BiON SCE Indonesia di Ruang Rapat Bupati, Komplek Pemkab Bekasi, Kamis (26/8).

Dani meminta kepada Perangkat Daerah terkait untuk dapat mulai mengkaji proses pengolahan sampah tersebut. Sehingga apabila selesai dikaji, proses kerja sama dapat segera dilanjutkan.

"Segera jadwalkan untuk paparkan kajiannya kelebihan dan kekurangannya agar bisa segera diputuskan. Mudah-mudahan dalam satu kali perte-



Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan (lima kanan), perangkat daerah terkait serta perwakilan dari PT BiON SCE Indonesia foto bersama saat rapat pemaparan terkait pengolahan sampah TPA Burangkeng di Ruang Rapat Bupati, Kamis (26/8).

Terkait pengajuan kerja sama pengolahan sampah TPA Burangkeng, Pj. Bupati Bekasi tidak menutup kemungkinan

apabila ada pihak lainnya yang ingin mengajukan kerja sama serupa. "Jika ada pihak lain yang mengajukan kerja sama

FOTO: DOK.PIM, PROKOPIM SETDA KABUPATEN BEKASI

dengan metode serupa, kita tidak menutup kemungkinan, nanti bisa dibandingkan mana yang manfaatnya lebih besar. Tetapi jika tidak ada, bisa dilanjutkan prosesnya," jelasnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Lingkungan Hidup berencana untuk mengolah sampah di TPA Burangkeng, Setu, agar memiliki nilai ekonomis yang dapat bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Bekasi.

Hal tersebut dikarenakan kondisi sampah di TPA Burangkeng yang sudah penuh, serta tidak dimungkinkannya untuk memperluas lahan atau membuat TPA lainnya.

Pada kegiatan tersebut turut hadir Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Abdur Rofiq, Kepala Bagian Kerja Sama, Dwy Sigit Andirian, serta jajaran pihak PT. BiON SCE Indonesia. ● mdl